BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan tahun 2025, oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang didalamnya terdapat penjabaran Visi, Misi, Program dan Kegiatan, serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Nunukan tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan dokumen RKPD Kabupaten Nunukan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Yang mana merupakan acuan dalam penyempurnaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dalam tahun yang sama, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan tahun 2025 memiliki sinergitas dengan program serta kegiatan Pemerintah Kabupaten Nunukan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Nunukan.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan yang mengacu pada prinsip-prinsip good governance dan merupakan prasyarat setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam mewujudkan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan akurat, sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Penyusunan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Rencana kerja SKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu satu tahun kedepan.

Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangat menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Esensi dokumen Renja SKPD adalah merupakan penjabaran dari tupoksi SKPD dan searah dengan Visi, Misi dan agenda SKPD. Tujuan Penyusunan Renja SKPD adalah menetapkan dan mengukur pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan data, dan melaporkan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999,tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas pada tahun 2024. Dengan demikian, Rencana kerja Tahun 2025 ini berisikan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk mengarahkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan sehingga sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3. Program, Kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri No.90 tahun 2019 (Tabel TC.33)

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian antara lain berupa catatan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan merupakan pelaksanaan tahun kedua dari perencanaan lima tahunan atau Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025. Adapun Matriks Rekapitulasi Evaluasi Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.29

Tabel T-C 2.9
Rekapituasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Nunukan

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan ahun Lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%) Capaian 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	**01**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**12 bulan**							
8	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	1 laporan							
8	01	01	2	01	05	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dok	1 %	4 dokumen	9	4,5 %
8	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	-	1 laporan	1 lap	100%	1 Laporan	2	2 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan tahun Lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019)	
										Target Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah unit kerja internal yg mendptkan layanan adm. keuangan	**100%**							
8	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah laporan capaian kinerja dn keungan yng disusun tepat waktu	14 Bulan	14 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	38 bulan	2,71 %
8	01	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan yang disediakan	100%							
8	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan yang disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	18 paket	3%
8	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	**12 Jenis**	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Jenis	36 Jenis	3%
8	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	**12 Bulan**	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 paket	3%
8	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	4 laporan	4 laporan	10 org	10 org	100%	4 laporan	18 kali	4,5%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan ahun Lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024	
										Target Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	01	2	08		**Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**100%**							
8	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36	3%
8	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 laporan	36	3%
8	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor yang dibayarkan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	36	3%
						Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA	jumlah SAPRAS yg mendapatkan pelayanan jasa pemeliharaan	100%							
8	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas/Ops/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional/yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	**6 unit**	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	18	3%

8	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-
8	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	3 %
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100%							
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 unit	-	25 unit	25 unit	100%	17 unit	42	2,47%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022	Target dan ahun Lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat (2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024	
										Target Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	**01**	**02**				**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa**	**Persentase cakupan peserta program pendidikan Wasbang**	71%							
8	01	02	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan	6 lap	6 lap	6 lap		1 lap		
8	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wasbang Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	150 org	75 org	75 org	75 org	100%	150 org	300 org	2 %

							Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan ahun Lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	02	2	01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	43 org	-	53 43(Kab) 10(Prop)	53 43(Kab) 10(Prop)	100%	43 org (msh st sub keg)	96 org	2.23%
8	01	03				**Program Peningkatan Peran Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase cakupan pendidikan politik bagi pemilih**	35%							
8	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Parpol, Pemilu/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik	**Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol pemilu/pemilukada**	1 laporan							

							dan pemantauan situasi politik								

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan ahun Lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019)	
										Target Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	03	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Parpol, Pemilu/Pilkada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah org yang mengikuti pelaksanaan kebijkan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan parpol, pemilu / pemilukada, serta pemantauan situasi politik daerah	50 org	50 org	150 org	150 org	100 %	50 org	250 org	5%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan ahun Lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024	
										Target Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	**01**	**04**				**Perogram Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**cakupan ormas ,SKT, dan SKL**	100%							
8	01	04	2	01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ORMAS	jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 laporan							
8	01	04	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 org	100 org	100 org	100%	100%	100 org	300 %	3 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan ahun Lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019)	
										Target Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	**01**	**05**				**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya**	89%							
8	01	05	2	01		Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	*Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya*	1 laporan							
8	01	05	2	01	01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi,sosial, budaya & fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, FKUB & penghayat kepercayaan di daerah*	150 org	50 org	150 org	100%	100%	250 org	450 org	45 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022)	Target dan tahun Lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019)	
										Target Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	06				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	***Presentase Wawasan Nusantara untuk NKRI***	71,43%							
8	01	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	*jumlah kebijakan teknis & pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasinal & penanganan konflik sosial*	28 Pertemuan							

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2022	Target dan tahun Lalu (n2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat (2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan)	
										Target Renja Perangkat Daerah (n-2) (2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	06	2	01	01	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Daerah	*jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibdg kewaspadaan dini,kerjasama Intelijen,pemantauan org asing, tenaga kerja asing & lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaanbidang kewaspadaan,serta penanganan konflik didaerah*	350 org	250 org	350 org	150 org	100%	350 org	750 org	2,14%
8	01	06	2	01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)	Jumlah Pertemuan	6 Pertemuan	6 pertemuan	6 Pertemuan	100%	16,66%	6 pertemuan	18 pertemuan	4,5 %

a. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan merupakan unsur pendukung tugas Bupati Nunukan dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah di Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/ kegiatan dapat dilihat pada tabel T- C. 30

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nunukan

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah Kegiatan (PHBN)			2	2	2	2	2	2	2	2	kegiatan Upacara Paskibra dan Sosialisasi
2.	jumlah peserta sosialisasi Wasbang,Pembauran Kebangsaan, Bela Negara			150	150	150	150	150	150	150	150	org
3	Jumlah peserta sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)			150	250	150	150	150	250	150	150	org
4	Jumlah Laporan/Pertemuan (FORKOPIMDA)			6	6	6	6	6	6	6	6	Pertemuan
5	jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan			50	50	50	50	50	50	50	50	Org

	demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan Parpol,Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta Pemantauan situasi politikdi daerah											
6	*jumlah Orang yg mengikuti pelasanaan kebijakan dibidang pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas,Pengawasan Ormas & Ormas asing di daerah*			50	50	50	50	50	50	50	50	

b. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan, dalam pelaksanaannya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat straregis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi percepatan tujuan dan sasaran organisasi. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya pada faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi.

2.3. Isu-Isu Strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Faktor-faktor dari pelayanan BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :

A. Bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan SOSEK, budaya dan agama

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengembangan ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun hubungan yg harmonis antar suku, agama dan ras

Solusinya :

- Perlu dilakukan sosilisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perntingnya pengembangan ketahanan social, ekonomi, budaya dan agama

- Perlu adanya peningkatan fasilitasi dari pemerintah untuk menjalin hubungan yg harmonis antar PEMDA, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh etnis, dan seluruh lapisan masyarakat
- Perlu peningkatan rasa cinta damai untuk meewujudkan hubungan masyarakat yang harmonis.

B. Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a. Perubahan perilaku social masyarakat sebagai dampak Teknologi dan informasi
b. Mudanhya masyarakat terprovokasi dengan Isu SARA dan berita Hoax menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024
c. Lemahnya pemahaman dan rendahnya implementasi ideology Pancasila dan wasbang

Solusinya:

- Pembinaan FPK lebih maksimal
- Peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi
- Kemitraan dengan Kerukunan etnis, sekolah
- Pembumian nilai-nilai Pancasila dan Wasbang

C. Bidang Politik Dalam Negeri, Pemberdayan dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraktan

Peningkatan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansi yaitu demokrasi yang mengemban amanat rakyat

Solusinya:

- Diharapkan demokrasi bergerak dari demokrasi Prosedural/Transaksional menuju demokrasi Substansial.
- Alur pergerakan :
  a. Penguatan kapasitas Parpol dan Pranata Politik
  b. Revitalisasi Pancasila
  c. Penguatan demokrasi didaerah dan partisipasi politik
  d. Pemantapan Perundang-undangan Politik
  e. Lembaga perwakilan yg efektif
  f. Sistem presidensial yg efektif

D. Bidang KEWASNAS dan penanganan konflik social

- Belum optimalnya kewaspadaan dini masyarakat, pemantauan orang asing, penanganan konflik social, upaya pencegahan secara dini, bahaya terorisme dan radikalisme
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hokum dan HAM yg berpotensi konflik dan disintegrasi social.

Solusinya :

- Pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen
- Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaporan tugas kewaspadaan penanganan konflik sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C. 31 berikut ini :

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Nunukan

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif 2024	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	12 bulan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	12 bulan		
2.	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100%	23.645.600	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100%	23.645.600	
3.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Lap	13.590.150	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Lap	13.590.150	
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	10.055.450	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	10.055.450	
5.	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Jumlah unit kerja internal yg mendptkan layanan adm. keuangan	14 bulan		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Jumlah unit kerja internal yg mendptkan layanan adm. keuangan	14 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Nunukan	Jumlah bulan penyediaan gaji & tunjangan ASN	14 bulan	3.335.675.964	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Nunukan	Jumlah bulan penyediaan gaji & tunjangan ASN	14 Bulan	3.335.675.964	
7	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan yang disediakan**	**100%**		**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan yang disediakan**	100%		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nunukan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan yang disediakan	6 Unit	1.992.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nunukan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan yang disediakan	6 Unit	2.000.000	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Nunukan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	3.468.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Nunukan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	3.500.000	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nunukan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	12 Bulan	28.330.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nunukan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	12 Bulan	29.000.000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Nunukan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	10.799.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Nunukan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	10.800.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nunukan	Jumlah Rapat Koordinasi danKonsujltasi yang diikuti	4 Kali	86.719.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nunukan	Jumlah Rapat Koordinasi danKonsujltasi yang diikuti	4 Kali	87.000.000	
12	**Keg. Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**100%**		**Keg. Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**100%**		
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nunukan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nunukan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nunukan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	102.864.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	105.864.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nunukan	Jumlah Honor yang dibayarkan	12 bulan	188.788.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Honor yang dibayarkan	5 Jenis	190.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan	**Jumlah SAPRAS yang mendapatakan pelayanan jasa pemeliharaan**	100%		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**Jumlah SAPRAS yang mendapatakan pelayanan jasa pemeliharaan**	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas/Ops/Lapangan	Kab. Nunukan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional/yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	12 Bulan	61.370.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak ,Perizinan Kendaraan Dinas/Ops/Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional/yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	12 Bulan	62.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	Kab. Nunukan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya		Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	200.000.000	

	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA	Kab. Nunukan	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan PD	100%							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Nunukan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yg disediakan	25 unit	208.094.906	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yg disediakan	25 unit	208.094.906	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kab. Nunukan	***Presentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula***	***0,034***	***38.325.556.952***	***Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik***		***Presentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula***	0,034	***38.325.556.952***	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Kab. Nunukan	**jumlah kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan & parpol Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta**	1 LAP	***38.325.556.952***	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,***		**jumlah kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan & parpol Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi**	1 LAP	***38.325.556.952***	

	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		**pemantauan situasi politik**			***Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***		**politik**			
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. NNK	*jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwa kilan dan Parpol,Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta Pemantauan situasi politikdi daerah*	50 org	***38.325.556.952***	*Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah*		*jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakil an dan Parpol,Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta Pemantauan situasi politikdi daerah*	50 org	***38.325.556.952***	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. NNK	***Presentase Peserta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan***	***67%***	***1.070.463.390***	***Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***		***Presentase Peserta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara***	***67%***	***1.070.463.390***	

			Bela Negara								
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		***jumlah kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila & karakter kebangsaan***	1 lap	***1.070.463.390***	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***		***jumlah kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila & karakter kebangsaan***	1 lap	***1.070.463.390***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi Wasbang Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Nunukan	*Jumlah orang yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi Wasbang, bela negara, karakter bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan*	150 org	***1.070.463.390***	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi Wasbang Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Nunukan	*Jumlah orang yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi Wasbang, bela negara, karakter bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan*	150 org	***1.070.463.390***	
	Pembentukan Paskibraka	Kab. NNK	*Jumlah Paskibraka*	43 org	1.070.463.390	Pembentukan Paskibraka	Kab. nnk	Jumlah Paskibraka	43 org	1.070.463.390	
	Perogram Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Kab.Nunukan**	***Presentase Pelayanan Pendaftaran bagi Organisasi Kemasyarakatan (LSM, Yayasan, Perkumpulan)***	100%	***84.787.190***	**Perogram Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Kab.Nunukan**	***Presentase Pelayanan Pendaftaran bagi Organisasi Kemasyarakatan (LSM, Yayasan, Perkumpulan)***	100 %	***84.787.190***	
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ORMAS	Kab.Nunukan	***Jumlah kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan & pengawasan Ormas***	1 lap	***84.787.190***	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ORMAS	Kab.Nunukan	***Jumlah kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bidang***	1 lap	***84.787.190***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing Daerah	Kab.Nunukan	*jumlah Orang yg mengikuti pelasanaan kebijakan dibidang pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas,Pengawasan Ormas & Ormas asing di daerah*	50 org	***84.787.190***	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing Daerah	Kab.Nunukan	*jumlah Orang yg mengikuti pelasanaan kebijakan dibidang pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas,Pengawasan Ormas & Ormas asing di daerah*	50 org	***84.787.190***	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	**Kab. Nunukan**	***Presentase peran Masyarakat dalam terciptanya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya***	89%	***597.963.120***	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Kab. Nunukan**	***Presentase peran Masyarakat dalam terciptanya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya***	89%	***597.963.120***	
	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Kab. Nunukan	***Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya***	1 lap	***597.963.120***	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Kab. Nunukan	***Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya***	1 lap	***597.963.120***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Nunukan	*Jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi,sosial, budaya & fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, FKUB & penghayat kepercayaan di daerah*	150 org	***597.963.120***	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Nunukan	*Jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi,sosial, budaya & fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, FKUB & penghayat kepercayaan di daerah*	150 org	***597.963.120***	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kab. Nunukan	***Presentase Wawasan Nusantara untuk NKRI***	***71,43***	1.727.067.640	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	Kab. Nunukan	***Presentase Wawasan Nusantara untuk NKRI***	***71,43***	1.727.067.640	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	Kab. Nunukan	***jumlah kebijakan teknis & pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasinal & penanganan konflik sosial***	1 lap	***663.313.680***	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	Kab. Nunukan	***jumlah kebijakan teknis & pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasinal & penanganan konflik sosial***	1 Lap	***663.313.680***	
	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Daerah	Kab.Nunukan	*jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibdg kewaspadaan dini,kerjasama Intelijen,pemantauan org asing, tenaga kerja asing & lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaanbidang kewaspadaan,serta penanganan konflik didaerah*	*350 org*	***663.313.680***	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Daerah	Kab.Nnk	*jumlah org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan dibdg kewaspadaan dini,kerjasama Intelijen,pemantauan org asing, tenaga kerja asing & lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaanbidang kewaspadaan,serta penanganan konflik didaerah*	350 org	***663.313.680***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)	Kab. Nunukan	Jumlah Pertemuan	*6 pertemuan*	*1.063.753.960*	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)	Kab. Nunukan	Jumlah Pertemuan	6 pertemuan	*1.063.753.960*	

c. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kajian usulan program dan kegiatan untuk SKPD provinsi mencakup skala yang lebih besar dan ruang yang lebih luas dan merupakan pemangku kepentingan yang sangat strategis.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Pada tahun anggaran 2025 ada beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diajukan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut akan ditampilkan Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Nunukan.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kabupaten Nunukan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	Kec. Sebatik Barat, Sebatik, Sebatik Utara, Tulin Onsoi, Sebuku	Presentasi peran Masyarakat dalam terciptanya ketahanan ekonomi, sosial,dan budaya	150 orang	
	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya		Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahana ekonomi, sial dan budaya		
2.	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	21 Kecamatan	Presentasi Wawasan Nusantara untuk NKRI	350 org	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspaan Nasional Penangana Konflik Sosial		Jumlah kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten / Kota	6 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	*(5)*	*(6)*
3	**Penguatan Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Presentase peserta sosialisasi pembauran kebangsaan dan Pendidikan wasbang dan bela negera	150 orang	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebabngsaan		Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paskibraka	43 orang	
4	**Program Peningkatan peran Parpol dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik**	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pendidikan politik bagi pemilih pemula	50 Orang	
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidkan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan Parpol, pemilihan umum / pemilukada serta pemantauan situasi politik		Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan Parpol, pemilihan umum / pemilukada serta pemantauan situasi politik		
	Program pemberdayaan dan pengawasan ormas	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Presentase pelayanan pendaftaran bagi ormas (LSM, Yayasan, Perkumpulan)	50 org	
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas		Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas		
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Kab. Nunukan, semua	***Presentase peran Masyarakat dalam***	150 orang	

	Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kecamatan dan Kelurahan	***terciptanya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya***		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		*Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya*		
6	***Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial***	21 Kecamatan	***Presentase Wawasan Nusantara untuk NKRI***	350 org	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		*jumlah kebijakan teknis & pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasinal & penanganan konflik sosial*		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		*jumlah dokumen hasil pelaksanaan FORKOPIMDA Kab/Kota*	6 dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum terbentuk berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015. Pada tahun 2025 fokus prioritas nasional ada 5 (lima) yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Mengutamakan Konektivitas dan Pemerataan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Dimana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan juga masuk dalam fokus prioritas nasional yaitu Stablitias Pertahanan dan Keamanan dengan didukung oleh beberapa program prioritas daerah yang mendukung prioritas nasional diantara sebagai berikut :

1. Program Penguatan, Ideologi Pancasila Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Parpol dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosbud
5. Program Peningkatan Kewaspaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Merujuk pada skala prioritas nasional yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan berupaya untuk menerapkan beberapa kebijakan kiranya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kabuaten Nunukan sebagai berikut :

1. Kesekretariatan dengan indikator kinerja diarahkan sebagai penunjang penyelenggaraan administrasi badan serta pemenuhan sarana dan prasarana badan serta penyelenggaraan koordinasi dengan BADAN KESBANGPOL Kab / Kota se Provinsi Kalimantan Utara
2. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja diarahkan pada pembinaan dan pengembangan ideologi Negara dan bela Negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa. Kedua hal ini meliputi fasilitasi FPK, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional maupun daerah berkenaan dengan ideologi Negara dan bela Negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
3. Kewaspadaan Daerah yang difokuskan pada kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan orang asing yang meliputi FKDM, manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik daerah di kabupaten Nunukan, pendataan dan pengawasan serta pemantauan orang asing, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan dengan situasi dan kondisi ipoleksosbudhankam.
4. Ketahanan Sosial Ekonomi, dengan indikator kinerja diarahkan pada FKUB, ketahanan sosial, dan ekonomi serta fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan dengan Ketahanan Sosial Ekonomi.
5. Politik Dalam Negeri dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta fasilitasi kelembagaan dan pendidikan politik, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat, serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri di Kabupaten Nunukan

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang enunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan selama 5 (lima) tahun.

A. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi oleh SKPD BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan. Tujuan ini merupakan implementasi dari setiap pernyataan misi yang telah dibuat, menjelaskan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh SKPD BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan pada Tahun 2021-2026.

Penjabaran berdasarkan visi dan misi yang telah dibuat ditetapkan tujuan dengan sasaran sebagai berikut :

Misi :

Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tertib, dan Tenteram

Tujuan dari Misi tersebut adalah :

Memperkuat Ketahanan Nasional di Daerah

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tiap-tiap tujuan SKPD BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil antara yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan yang sebenarnya. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan. Penetapan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran di sini akan dilaksanakan secara rutin dan/atau berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dalam Tahun 2021-2026

Sasaran tersebut terdiri dari :

Menguatnya Karakter Kebangsaan

.

1.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan perwujudan dalam upaya pencapaian berbagai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tetap senantiasa memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi SKPD BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian Visi dan Misi SKPD BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh SKPD BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan atau bersama dengan SKPD lainnya ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada BAKESBANGPOL Kabupaten Nunukan dialokasikan melalui komponen Belanja langsung yang dijabarkan 6 (enam) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Peerintahan Daerah Kabupten/Kota
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   e. Penyediaan Bahan ogiatik Kantor
   f. Penyediaan Bahan Cetkan dan Penggandaan
   g. Penyelnggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan LIstrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantror dan bangunan lainnya.

2. Program Penguatan Udeologi Pancasila dan Karakter Bangsa

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang IDeologi Pancasila dan Karakter Bangsa

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa.
2. Pembentukan PASKIBRAKA.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidian Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Plkada, serta Pemantauan Situasi Politik

1. Budaya Poitik, Peningkatan Demokrasi, Fasiitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Plkada, serta Pemantauan Situasi Politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan, Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas serta fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial

1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah
2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja yang memuat program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yeng telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kegiatan di Tahun 2025 oleh para pimpinan SKPD dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Nunukan, 20 Maret 2024

Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Nunukan,

Hasan Basri,S.IP

NIP. 19731005 200502 1 003